

PEMBINAAN PASCA IBADAH HAJI MENUJU MABRUR SEPANJANG HAYAT

POST-HAJJ PILGRIMAGE FOSTERING TOWARDS A LIFETIME MABRUR

Zaenal Abidin

Peneliti Ahli Madya Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama
bidin04oke@gmail.com

Mahrus Ali

Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia
mahrusaliabda@gmail.com

Artikel diterima 1 Mei 2020, diseleksi 18 Mei 2020, dan disetujui 12 Desember 2020

Abstract

This research is about the challenges of post-hajj fostering to the pilgrims (hujjaj) in Indonesia which are quite large in number. All the pilgrims hope 'ridha' of Allah SWT to obtain perfection in the pilgrimage. That hope is manifested in the efforts of Hajj simulation training to ensure the hajj ritual in worship is based on the syariah. The Ministry of Religious Affairs on behalf of government currently only provides Hajj simulation such as education and training both in before the departure of the pilgrimage organized by the Office of the Ministry of Religious Affairs in Regencies / Cities and the Office of Religious Affairs (KUA) in the Districts, and at the time of the pilgrimage was held but it does not conduct post-hajj fostering. Whereas post-hajj fostering is needed by the pilgrims to maintain the sustainability of the perfection in the pilgrimage. To this day, the only organization actively carries out post-hajj fostering is the Indonesian Hajj Fraternity Association (IPHI) that is spread throughout the territory of Indonesia (the central board, province board and in almost all regencies / cities and Sub-districts). This post-hajj fostering research is conducted qualitatively by using observation, interviews and documents as data collection. Based on this research, it is known that the efforts to develop post-hajj fostering in order to achieve the perfection on Hajj throughout life is a formidable challenge that needs the support of society and government.

Keywords: Pilgrimage Fostering, Post-Hajj, Mabrur, IPHI

Abstrak

Paper ini membahas tantangan pembinaan pasca ibadah haji terhadap para haji (*hujjaj*) di Indonesia yang jumlahnya cukup besar. Jemaah haji berharap ridha Allah SWT untuk memperoleh haji mabrur. Harapan itu diwujudkan dalam usaha pembinaan manasik agar rangkaian ibadah haji benar sesuai dengan syariat. Pemerintah melalui Kementerian Agama, R.I. sesuai dengan tugas dan fungsinya saat ini hanya memberikan pembinaan dengan melakukan bimbingan manasik sebelum keberangkatan ibadah haji yang dilaksanakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan dan pada waktu penyelenggaraan ibadah haji, namun tidak melakukan pembinaan pasca ibadah haji. Padahal, pembinaan pasca ibadah haji dibutuhkan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan haji mabrur. Selama ini, yang aktif melakukan pembinaan pasca ibadah haji adalah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) yang eksistensinya tersebar di seluruh provinsi dan di hampir seluruh Kabupaten/Kota dan kecamatan di wilayah Indonesia. Penelitian pembinaan pasca ibadah haji ini dilakukan secara kualitatif dengan wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa upaya pembinaan pasca ibadah haji yang dilakukan IPHI demi meraih haji mabrur sepanjang hayat merupakan tantangan berat yang perlu mendapat dukungan dari seluruh unsur masyarakat maupun pemerintah.

Kata kunci: Pembinaan, Pasca Ibadah Haji, Mabrur, IPHI

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan ibadah Haji sebagai ajaran Islam menarik perhatian banyak peneliti, terutama dari kalangan ahli agama, sejarawan, sosiolog, antropolog dan ahli manajemen. Mereka tidak hanya melihat haji dalam konteks ritual, bahkan mengkaji peran strategis para haji dalam konteks sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan di tengah masyarakat. Snouck Hourgronje, Jacob Vredenberg, Marcel Witlox, Kees van Dijk, William R. Roff, Victor Turner, Martin van Bruinissen, dan lain-lain, merupakan sarjana-sarjana yang serius melakukan penelitian tentang haji (Suryana, 2013).

Sejarah mencatat peran para haji di bumi Nusantara dari tahun ke tahun memang memberi kontribusi positif bagi masyarakat (Putuhena, 2007). Para haji yang baru pulang dari *Baitullah* tidak sedikit yang kemudian menjadi tokoh masyarakat, mereka dipercaya, didaulat dan dijadikan rujukan dalam tugas-tugas ritual keagamaan dan tugas sosial bahkan sering dipercaya dalam menyelesaikan berbagai persoalan pribadi anggota masyarakat. Mereka menjadi panutan yang efektif dalam mengarahkan masyarakat pada tata kehidupan yang religius, tertib hukum dan aturan lainnya menuju masyarakat damai dan beradab atau '*toto tentrem*'. Para haji di masa lalu bahkan menjadi penggerak sosial terdepan termasuk dalam merebut kemerdekaan (Madjid, 2008).

Banyak pihak berharap para haji akan meningkatkan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat luas, terlebih jumlahnya makin bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, kuota resmi jemaah haji Indonesia sebanyak 231.000 orang yang terdiri dari 214.000 untuk jemaah haji reguler dan 17.000 untuk jemaah haji khusus. Dengan asumsi angka tersebut, maka dalam 10 tahun terakhir diperkirakan terdapat lebih dari 2,3 juta haji. Jika ditambahkan 70% haji 10 tahun

sebelumnya (1,6 juta), ditambah 50% haji 10 tahun di belakangnya lagi atau 20 tahun sebelumnya (1.150.000), dan 30% haji 10 tahun di belakangnya lagi atau 30 tahun sebelumnya (690 ribu) yang masih hidup, maka diperkirakan ada sekitar 5,7 juta haji di bumi pertiwi. Dengan tambahan setiap tahun dan dikurangi yang wafat, angka moderat untuk menghitung jumlah haji di tahun berjalan adalah sekitar 6 (enam) juta atau 2,3% dari total 260 juta penduduk Indonesia. Persentase jumlah haji ini digunakan secara resmi oleh IPHI untuk memprediksi kisaran jumlah haji pada tahun berjalan.

Keberadaan para haji tersebut dan penambahan jemaah haji baru setiap tahun merupakan sumber potensial terbarukan yang dapat ditingkatkan peran sertanya di masyarakat pada umumnya. Namun peran positif para haji yang saat ini jumlahnya semakin bertambah tersebut semakin kurang dirasakan di tengah masyarakat.

Ibadah Haji sesuai dengan bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (UU 8/2019) adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di *Baitullah*, masyair, serta tempat, waktu dan syarat tertentu. Setiap jemaah haji mengharapkan meraih haji mabrur (haji yang diterima oleh Allah) dengan berbagai persyaratan yang harus di penuhi yang diantaranya ibadah haji yang dilaksanakan itu sah dan sempurna.

Upaya untuk memperoleh haji mabrur antara lain dilakukan sejak sebelum keberangkatan dengan mengikuti pembinaan manasik haji baik di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan maupun di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Calon jemaah haji juga dapat mengikuti manasik mandiri atau bersama Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang tersebar

hampir di seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia..

Dirasa belum cukup bekal untuk menjaga haji mabrur sepanjang hayat, sepulang dari tanah suci, masyarakat haji melakukan kajian-kajian keagamaan untuk menambah ilmu dengan membentuk majelis bersama. Majelis yang dibentuk dari kalangan alumni kloter/rombongan/regu dari masing-masing daerah dengan melakukan kegiatan baik secara mandiri maupun secara sporadis. Namun kegiatan pembinaan yang dilakukan masyarakat tersebut dirasa kurang maksimal.

Selain itu ada kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat haji yang dilakukan secara mandiri dan juga ada yang dalam inisiasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Pembinaan pasca haji yang masih dilakukan pada umumnya berlatar belakang sebagai bentuk tanggung jawab sebagai penyelenggara ibadah haji dan secara kultur terkait dengan anggapan bahwa pembinaan pasca ibadah haji menjadi bagian tugas dan fungsi Kementerian Agama. Namun tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan Kementerian Agama untuk melakukan pembinaan pasca ibadah haji.

Di antara masyarakat haji yang telah membentuk organisasi kemasyarakatan dan melakukan pembinaan pasca ibadah haji adalah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat IPHI. IPHI sejak berdiri di tahun 1990 hingga saat penelitian ini dilakukan terus meningkatkan khidmat dalam pembinaan pasca ibadah haji. IPHI memiliki struktur kepengurusan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga sampai kecamatan. IPHI sebagai organisasi kemasyarakatan selain sudah memiliki struktur organisasi dan kepengurusan di hampir seluruh wilayah Indonesia juga sudah menjalankan

program pembinaan pasca ibadah haji dengan baik. Kegiatan pembinaan pasca ibadah haji yang berjalan di masyarakat selama ini sebagian besar dilakukan oleh IPHI, kegiatan dapat dijalankan secara terprogram karena didukung oleh struktur organisasinya IPHI yang sudah mapan.

Penelitian dengan mengambil judul *Pembinaan Pasca Ibadah Haji Menuju Mabrur Sepanjang Hayat*, menjadi penting dan signifikan untuk mengetahui lebih mendalam kegiatan pembinaan pasca ibadah haji yang telah melembaga di masyarakat. Fokusnya adalah untuk mengetahui program kegiatan pembinaan pasca ibadah haji yang dilakukan IPHI sebagai organisasi masyarakat haji. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan dan peranan IPHI dengan cara mendeskripsikan dinamika program kegiatan pembinaan pasca ibadah haji menuju mabrur sepanjang hayat yang dilakukan oleh IPHI.

Telaah Literatur

Penelitian mengenai haji mabrur belum pernah dilakukan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, namun sudah banyak dibahas dalam karya-karya akademik baik dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi. Hasil penelitian Seno Hadi Sumitro (2017) dengan judul tesis, *Konsepsi Haji Mabrur Perspektif Al Qur'an*, menyorot Haji mabrur dari perspektif Al-Quran, yaitu:

“Haji yang semata-mata tujuannya hanya kepada Allah swt (*lillah*) dan tidak ada tujuan lainnya. Para *hujaj* senantiasa beraqidah tauhid, ikhlas, *dzikrullah* dan *muttaqin* dengan demikian haji mabrur itu selalu menjaga diri dari sesuatu yang merusak dan senantiasa berusaha melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Implementasi haji mabrur dalam dimensi sosial yaitu apabila para *hujaj* ikut ambil bagian

dalam perubahan sosial. Sedangkan implikasi haji mabrur di tengah masyarakat adalah apabila haji tidak mabrur maka tata kehidupan masyarakat akan rusak, sebaliknya apabila para haji mabrur maka tata kehidupan masyarakat akan baik dan teratur.”

Sementara itu, terkait pembinaan pasca ibadah haji menuju haji mabrur yang dilakukan IPHI, Rizal Akbar Aldyan (2017) dalam skripsi dengan judul *Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Surakarta Tahun 1992-2014*, menyimpulkan:

“IPHI Kota Surakarta yang berperan pada calon jemaah haji untuk menggapai haji mabrur adalah pada periode I, II dan V dengan melakukan bimbingan manasik haji. Dalam menjaga kemabruran jemaah haji IPHI Kota Surakarta dari Periode I sampai V melakukan kegiatan, keagamaan, sosial, dan kelembagaan. Periode I mewakafkan ruangan di RS Yarsis, periode II pengadaan lahan parkir. Periode IV pengadaan ambulance dan mendirikan poliklinik.”

Penelitian ini juga mendalami kemabruran para haji, dalam bentuk aktivitas memelihara haji mabrur di tengah masyarakat dengan mengfokuskan pada kegiatan pembinaan pasca ibadah haji menuju mabrur sepanjang hayat yang dilakukan oleh IPHI. Dalam slogannya yang dikenalkan kepada masyarakat haji, IPHI menekankan pentingnya menjaga haji mabrur sepanjang hayat.

Tinjauan Teori

Pembinaan, sebagaimana dibahas para ahli mengandung pengertian, arahan yang dilakukan secara sadar agar menjadi mandiri dan memiliki kepribadian yang utuh dan matang mencapai aspek cipta,

rasa dan karsa. Istilah pembinaan atau berarti “pendidikan” adalah pertolongan yang diberikan dengan sengaja untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih tinggi dalam arti mental, perilaku dan pengetahuan. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan.

Pembinaan juga disebut dalam Pasal 32 UU 8/2019, bahwa Menteri bertanggungjawab memberikan pembinaan Ibadah Haji kepada Jemaah Haji. Selanjutnya di dalam Pasal 33 menyebutkan dalam menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan manasik haji reguler, Menteri dapat melibatkan Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU). Keterlibatan Kelompok Bimbingan dalam penyelenggaraan bimbingan ibadah haji diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan Dalam Pasal 1 huruf d disebutkan bahwa Kelompok Bimbingan adalah lembaga sosial keagamaan yang telah mendapat izin operasional dari Direktur Jenderal untuk melaksanakan bimbingan kepada Jemaah Haji sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, selama perjalanan, dan selama di Arab Saudi, sampai dengan kepulangan ke Indonesia. Dalam Pasal 76, kata pembinaan juga kembali disebut namun terkait tanggung jawab Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) kepada jemaahnya. Seringnya muncul kata pembinaan dalam UU 8/2019 ini menunjukkan bawah pemerintah dan masyarakat penyelenggara haji dan umrah diberi amanah untuk melakukan bimbingan dan pembinaan yang memadai, baik dan benar. Namun dengan demikian jelas bahwa pengaturan operasional KBIHU dan tanggung jawab

PIHK dalam melaksanakan bimbingan kepada Jemaah hanya sebelum dan pada waktu penyelenggaraan ibadah haji dan tidak sampai pada pembinaan pasca ibadah haji.

Dari beberapa pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengubah tingkah laku individu serta membentuk kepribadiannya, sehingga apa yang di cita-citakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Mengacu pada definisi tersebut, jelas bahwa pembinaan pasca ibadah haji yang dilakukan oleh IPHI adalah dengan membentuk sikap mental dan perilaku yang diharapkan serta membangun kecakapan ilmu pengetahuan, *skill* dan sikap yang mumpuni. Untuk itu, program dan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh IPHI antara lain dalam bentuk: pengajian rutin dengan materi untuk menjaga kemabruran haji, dan amal usaha sosial dan ekonomi (penyewaan Aula, memiliki Rumah Sakit, memiliki ruko-ruko yang disewakan untuk minimarket dan perkantoran), dan berkegiatan sosial seperti santunan bersama ratusan yatim dan dhuafa.

Adapun haji mabrur menurut bahasa adalah haji yang baik (*mabrur* dari akar kata *al-birru*: kebaikan) atau haji yang diterima oleh Allah SWT (*maqbul*). Sedangkan menurut istilah *syar'i*, haji mabrur ialah haji yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, dengan memperhatikan berbagai syarat, rukun, dan wajib, serta menghindari hal-hal yang dilarang (*muharramat*) dengan penuh kesungguhan dan penghayatan semata-mata atas dorongan iman dan mengharap ridha Allah SWT. Dalam buku '*Fiqih Haji Komprehensif*' yang diterbitkan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama RI (2016) dijelaskan bahwa untuk mencapai haji mabrur harus melalui haji *maqbul*, yaitu haji yang syarat dan rukun secara fikih terpenuhi.

Tentang haji mabrur, Nabi SAW menjelaskan secara tegas saat ditanya sahabat, yaitu: *pertama*, mereka yang dapat melaksanakan amal *thayyibul kalam*, sepulang haji menjadi lebih santun dalam bertutur kata. *Kedua*, gemar *ifsya'us salam*, menebarkan kedamaian. *Ketiga*, bersedia melakukan amal *ith'amut tha'am* atau memiliki kepedulian sosial, mengenyangkan orang lapar. Tiga kriteria tersebut disebut dalam dialog antara Nabi SAW dengan para sahabat yang kemudian dijadikan parameter eksoterik yang tampak sebagai ciri kemabruran haji.

Dari tiga ciri tersebut kesemuanya tampak bersifat kesalehan sosial, sehingga dapat disimpulkan bahwa predikat mabrur yang diraih oleh seorang yang telah menjalankan ibadah haji sebenarnya tidak hanya memberikan dampak terhadap kehidupan pribadi secara ritual-religi para haji saja, melainkan juga berdampak besar pada sisi sosial di lingkungan orang yang berangkat haji. Dalam hadits shahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Nasai disebutkan bahwa balasan haji mabrur tidak lain adalah surga.

Berdasarkan uraian tersebut pengertian haji mabrur dalam penelitian ini sesuai dengan slogan IPHI "*Haji Mabrur Sepanjang Hayat*". Slogan tersebut diwujudkan dalam bentuk program pembinaan yang telah dilakukan oleh IPHI, baik dalam bentuk kajian-kajian keagamaan maupun kegiatan amal dan sosial keagamaan.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan aktivitas terpenting yakni turun ke lapangan (*fieldwork*) di 2 lokasi penelitian, yaitu: di Kota Batu dan Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 21 Oktober

s.d. 2 November 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan dan kajian dokumen. Penentuan informan dilakukan secara purposif, yakni menentukan orang-orang yang mengerti dan memahami tema penelitian ini (Naniek, 2012). Dengan sasaran penelitian pada: (1) pelaksanaan pembinaan penyandang haji pasca ibadah haji oleh IPHI, dan (2) mengetahui keberadaan ormas IPHI dan peranannya dalam pembinaan pasca haji menuju mabrur sepanjang hayat.

Wawancara mendalam guna menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya, karena belum banyak informasi yang dimiliki tentang pembinaan yang dilakukan Pengurus Daerah (PD) IPHI. Subyek dalam penelitian ini pihak-pihak yang relevan menjadi informan dengan wawancara diantaranya adalah pengurus MUI kabupaten/kota, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kankemenag Kabupaten/Kota dan para pengurus PD IPHI. Observasi lapangan untuk mengamati secara langsung kegiatan kajian keagamaan dan sosial masyarakat yang dilakukan PD IPHI. Kajian dokumen dengan mempelajari literatur, hasil penelitian, dan peraturan/pedoman tentang IPHI

Analisis dilakukan secara deskriptif dan kritik. Setelah data dikumpulkan dari hasil wawancara sejumlah informan, observasi dan studi dokumen, maka selanjutnya data tersebut direduksi, dipaparkan dan diverifikasi. Analisis memberi penjelasan mengenai obyek dari penelitian yang dilakukan (Suwardi, 2006). Hasil pengumpulan data disusun berdasarkan kebutuhan penelitian, hasil wawancara di catat semuanya sambil dilakukan analisis. Pengolahan data dilakukan dengan mengklasifikasikan data berdasarkan masalah yang perlu dijawab. Pengolahan data dilanjutkan mereduksi dan mengverifikasi data guna menjawab masalah penelitian.

PEMBAHASAN

Masyarakat Memerlukan Pembinaan Pasca Ibadah Haji

Pembinaan pasca ibadah haji pada umumnya masih sangat di perlukan oleh masyarakat. Hal ini merupakan upaya untuk meraih haji yang mabrur bagi para haji, yang ciri-cirinya antara lain: santun dalam bertutur kata; menyebarkan kedamaian; memiliki kepedulian sosial, dan berperilaku (amal perbuatan) lebih baik dibandingkan dengan sebelum menunaikan ibadah haji; serta bertambah *zuhud* terhadap kehidupan dunia dengan lebih mengutamakan akhirat.

Kenyataannya masih banyak jemaah sepulang melaksanakan ibadah haji kehidupannya belum mencerminkan ciri-ciri haji mabrur dimaksudkan. Sebagaimana terlihat dalam kehidupan sehari-hari para haji, bahkan ada yang kembali ke asal sebelum haji karena tidak ada 'pembinaan' yang mengentalkan kemabruran hajinya. Pemalas ibadah, makin lama sepulang haji kembali malas seperti biasa. Yang sebelumnya terjangkau penyakit sosial seperti judi dan lainnya, beberapa tahun sepulang haji, ada yang kembali ke habitat lamanya. Juga dijumpai di tengah masyarakat, para haji yang dari awal memang belum memiliki pengetahuan agama yang memadai, sepulang haji harus menerima tugas-tugas dalam memimpin ibadah dan ritual keagamaan lainnya, tentu menghadapi masalah tersendiri, sehingga untuk mewujudkan ciri-ciri mabrur makin sulit. Oleh karena itu, bimbingan dan pembinaan pasca haji lebih-lebih juga perlu mendapat perhatian bersama oleh semua pihak baik pemerintah, organisasi keagamaan, tokoh agama dan masyarakat. Hal ini karena para haji diharapkan terus menjaga kemabruran haji mereka, selain itu juga secara alamiah dituntut menjadi '*pengarep*' atau pelopor dalam ritual dan tugas-tugas sosial lainnya. Oleh karena itu, sekurang-

kurangnya, pengetahuan para haji tentang manasik diharapkan paripurna. Untuk kebutuhan pasca haji, sekurang-kurangnya memiliki *skill* melaksanakan atau memimpin ritual agama, memiliki pengetahuan dasar (*knowledge*) haji, tauhid, fikih dan akhlak yang mencukupi karena umat pada umumnya menjadikan para haji sebagai rujukan dalam hal-hal tersebut. Komplementeri peran ritual dan sosial para haji inilah yang diharapkan terwujud sebagai hasil dari pembinaan pra dan pasca ibadah haji.

Sebagaimana tergambar dalam penelitian ini, urgensi program bimbingan dan pembinaan pasca haji mendesak untuk dilakukan mengingat latar belakang demografi Jemaah masih didominasi kelompok bawah secara pendidikan, ekonomi dan profesi. Gambaran demografi itu setidaknya tampak dalam profil Jemaah di dua daerah yang menjadi lokus penelitian ini, yaitu: di Kota Batu, Jawa Timur yang diasumsikan mewakili menengah atas baik secara ekonomi, pendidikan dan profesi tetapi faktanya juga masih memerlukan bimbingan tambahan. Demikian juga di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang diasumsikan mewakili daerah menengah bawah, tentu lebih memerlukan bimbingan dan pembinaan pasca ibadah haji.

Keadaan para haji di dua daerah tersebut merupakan cermin keadaan umum di daerah lain dengan ragam latar pendidikan, ekonomi dan profesi yang menunjukkan perlunya bimbingan dan pembinaan pasca haji secara terprogram. Di daerah yang diasumsi keadaan latar jemaah hajinya sudah baik secara ekonomi, pendidikan dan profesi serta usia, menunjukkan indikasi perlunya pembinaan. Terlebih daerah yang didominasi latar pendidikan dan profesi ekonomi, menengah ke bawah.

Pembinaan Jemaah Pasca Haji Oleh Pemerintah

Kementerian Agama yang mempunyai tugas dalam pembangunan bidang agama berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku saat ini tidak mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan jemaah pasca ibadah haji. Dengan demikian untuk menjaga kemabruran hajinya, menjadi tanggung jawab bersama semua pihak baik pemerintah, organisasi keagamaan, tokoh agama dan masyarakat. Terkait absennya pemerintah dalam pembinaan pasca ibadah haji, Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin (2014-2019) menjelaskan pada Rapat Kerja Nasional Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2019 di Hotel Margo Depok. Jumat (08/03/2019).

"Jadi memang tidak mungkin lagi Direktorat Jenderal PH melakukan pembinaan pasca haji karena waktunya. Karena siklusnya tidak ada tidak ada waktu tenggang waktu yang cukup untuk melakukan pembinaan maka perlu ada Direktorat Jenderal yang lain yang melakukan pembinaan ini. Lembaga yang lain kita mengenal ada ikatan persaudaraan haji. Lalu di daerah-daerah kan banyak apa kelompok-kelompok berangkat kloter bahkan rombongan atau kelompok-kelompok reuni sendiri kadang-kadang mereka reuni itu baik, hanya memang sejauh ini Pemerintah belum secara terstruktur secara terencana dengan baik menangani sisi ini karena memang kita menyadari betul kita masih memiliki keterbatasan,"

Meski demikian dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Departemen Agama/ Kementerian Agama pernah melakukan pembinaan jemaah pasca ibadah haji. Pembinaan jemaah pasca haji pernah dijalankan oleh organisasi dan tata kerja,

berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama (KMA 1/2001), dalam susunan struktur/organisasinya pernah memiliki Subdirektorat Bina Pasca Haji. Dalam KMA 1/2001 Pasal 269 disebutkan Subdirektorat Bina Pasca Haji yang mempunyai tugas melaksanakan rumusan rencana dan koordinasi pelaksanaan pembinaan jemaah pasca haji berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa pemerintah dalam hal ini Ditjen PHU, Kementerian Agama, R.I, dalam menjalankan tugas dan fungsinya pernah melakukan pembinaan jemaah pasca ibadah haji antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2006.

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)

Sejak tahun 1990-an sudah ada usaha pembinaan pasca ibadah haji untuk menjaga kemabruran di tengah masyarakat. Hal itu ditandai dengan berdirinya Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) yang diprakarsai Presiden Soeharto, Departemen Agama RI, sejumlah tokoh dan beberapa organisasi haji yang tersebar di beberapa daerah. Mukhtamar Persaudaraan Haji se-Indonesia diadakan di Jakarta pada tanggal 22-24 Sya'ban 1410 H bertepatan dengan tanggal 20-22 Maret 1990 M. Dalam Mukhtamar tersebut semua organisasi haji melebur menjadi IPHI.

Sejumlah tokoh terlibat dari kalangan ormas Islam, beberapa pejabat aktif Departemen/Kementerian Agama, Departemen/Kementerian lain, BUMN dan masyarakat haji Indonesia yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Saat didirikan terpilih sebagai Ketua Umum adalah dr. H. Sulastomo dan sebagai Sekretaris Jenderal Drs.

H. Mubarak, M.Si (1990–1999). Drs. H. Mubarak, M.Si pernah menjadi Direktur Jenderal pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama, R.I. (1998-2000) dan menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Agama R.I. (2000-2002) kemudian memimpin IPHI sebagai Ketua Umum selama dua periode (1999-2010). Ketua Umum IPHI berikutnya adalah Mayjen TNI (Pur.) H. Kurdi Mustofa, MM (2010-2018) dan kini sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat IPHI dipimpin H. Ismed Hasan Putro mantan Direktur Utama Rajawali Nusantara Indonesia (BUMN) dan sebagai Sekretaris Jenderal H. Samidin Nasir, MM, mantan Ketua Komisi Pengawas Haji Indonesia (2018-2020).

Saat ini IPHI sudah tersebar di seluruh Provinsi, dan Kabupaten/Kota terdapat sebanyak 540 kantor. Hanya ada sebanyak 2% daerah Kabupaten/Kota yang belum berdiri PD IPHI, yaitu daerah kabupaten pemekaran atau memang di wilayahnya tidak mempunyai masyarakat haji seperti Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Untuk Pengurus IPHI di kecamatan sudah tersebar di seluruh wilayah Jawa dan di Sumatera hampir 80%, untuk Kalimantan dan Sulawesi sudah 75%.

Ikatan Persaudaraan Haji berfungsi sebagai wahana penghimpun potensi para haji Indonesia, menyerap dan penyalur aspirasi umat, sebagai organisasi kemasyarakatan berupaya ikut serta menyukseskan program pembangunan bangsa, serta sebagai sarana untuk mempererat ukhuwah sesama umat. Dengan slogan "*Haji Mabruur Sepanjang Hayat*" berikut sekelumit tentang IPHI (Sumber: Buku Saku "*Sekelumit IPHI*"):

- a. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang selanjutnya disebut "Persaudaraan Haji" dengan alamat Jl. Tegalan No. 1 Matraman, Jakarta Timur.

- b. Kedudukan “Persaudaraan Haji” meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.
- c. Persaudaraan Haji Indonesia didirikan melalui Muktamar pada tanggal 22-24 Sya’ban 1410 H bertepatan dengan tanggal 20-22 Maret 1990 M, yang diprakarsai oleh Organisasi Persaudaraan Haji Indonesia untuk waktu yang tidak ditentukan.
- d. Persaudaraan Haji merupakan organisasi kebajikan bersifat independen, berakidah Islam, dan berasaskan Pancasila.
- e. Persaudaraan Haji, bertujuan memelihara dan mengupayakan pelestarian haji mabrur guna meningkatkan partisipasi umat dalam pembangunan bangsa yang diridhai Allah SWT, bertugas melaksanakan penyuluhan, pembimbingan, dan pembinaan kepada calon jemaah haji dan para haji Indonesia.
- f. Persaudaraan Haji, berfungsi sebagai wahana penghimpun potensi para haji Indonesia, menyerap dan penyalur aspirasi umat, sebagai organisasi kemasyarakatan berupaya ikut serta menyukseskan program pembangunan bangsa, serta sebagai sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah sesama umat.
- g. Keanggotaan Persaudaraan Haji: Seorang dapat diterima menjadi anggota setelah mengajukan surat permohonan menjadi anggota melalui pengurus IPHI terdekat, yang selanjutnya diteruskan kepada Pengurus Daerah Kabupaten/Kota untuk disahkan dan dikeluarkan Kartu Tanda Anggota (KTA). Syarat-syarat menjadi anggota terdiri atas:
 - 1). Warga negara Indonesia beragama Islam dan telah menunaikan ibadah haji.
 - 2). Masuk menjadi anggota atas kesadaran sendiri.
 - 3). Sanggup membayar uang pangkal, uang iuran, dan mentaati segala peraturan serta ketentuan organisasi Persaudaraan Haji.
- h. Usaha-usaha Persaudaraan Haji antara lain telah ikut memprakarsai berdirinya Rumah Sakit Haji di empat embarkasi: Jakarta, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang, mendirikan Bank Perkreditan Rakyat, menerbitkan Majalah Amanah, dan telah menyelenggarakan Turnamen Golf Amal IPHI sebanyak 7 kali.
- i. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah melakukan pembinaan masyarakat haji dengan membentuk majelis-majelis taklim, dan secara berkala mengadakan pengajian dari IPHI untuk masyarakat luas.
- j. Kegiatan sosial kemanusiaan antara lain mendirikan masjid, *Islamic Center*, *boarding school*, rumah sakit Tipe C dan klinik, memberikan modal bergulir kepada masyarakat prasejahtera, membantu bencana alam, pembagian sembako dan lain sebagainya.

Pembinaan Pasca Ibadah Haji IPHI

IPHI dalam mengupayakan haji mabrur sepanjang hayat dengan berbagai program dan kegiatan pembinaan pasca ibadah haji dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan kepada para haji yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. PP IPHI maupun di PD IPHI Kabupaten/Kota melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembinaan pasca ibadah haji yang mencakup sikap mental, perilaku dan pengetahuan. Dalam wawancara dengan Ismet Eko Putro Ketua Umum PP IPHI pada tanggal 1 November 2019 di Kantor PP IPHI Jl. Tegalan No. 1 Matraman, Jakarta Timur, Ismet menjelaskan:

“Seorang yang telah menunaikan ibadah haji tidak boleh bangga dengan status label haji saja, tetapi harus terus diedukasi dengan nilai-nilai ke-Islaman dalam kehidupan sosial, ekonomi dan kemasyarakatan yang berlangsung sampai wafat. Pasca melaksanakan ibadah haji harus memberi makna sosial bagi kehidupan di lingkungannya. Di seluruh kepengurusan IPHI baik di (Pusat, Wilayah, Daerah dan Kecamatan), hampir semua mempunyai kegiatan pengajian keagamaan, majelis taklim, peringatan hari besar Islam, dll. Namun PP IPHI lebih menekankan pada kemandirian ekonomi dan sosial, program dalam bentuk pengajian dan peribadatan sudah menjadi program masing-masing PD IPHI.”

Gagasan Ketua Umum IPHI sekarang ingin menjadikan seluruh kepengurusan IPHI Mandiri dengan menggerakkan ekonomi umat. Hasil wawancara dengan Samidin Nasir Sekretaris Jenderal PP IPHI pada tanggal 25 Oktober 2019 di Kantor PP IPHI Jl. Tegalan No. 1 Matraman, Jakarta Timur, Samidin menjelaskan bahwa:

“IPHI membuat 3 skala prioritas, yaitu: pertama, dakwah dan pendidikan dakwah diantaranya adalah Majelis Taklim untuk perempuan dan Majelis Dakwah untuk Laki-laki. Kedua, pembinaan kesehatan, dimana IPHI mendorong setiap Pengurus Wilayah IPHI Provinsi dan PD IPHI Kabupaten/ Kota mempunyai fasilitas kesehatan baik balai kesehatan/klinik ataupun rumah sakit (daerah yang sudah mempunyai rumah sakit: Klaten di beberapa kecamatan, Banjarnegara, Kudus, Jepara dan Kota Batu), dan hampir semua daerah sudah mempunyai klinik dan yang cukup besar ada di Jombang dan Karanganyar. Ketiga, pemberdayaan ekonomi dengan membentuk Koperasi syariah, izin sudah dari PP IPHI dengan nama

Koperasi Persaudaraan Haji (Koper Haji) dan hal ini sudah dirintis Usaha Produktif dengan merek/label ‘Haji’.”

Program prioritas IPHI tersebut secara umum mempunyai peluang dan sekaligus hambatan. Peluang yang ada: *pertama*, setiap tahun jumlah masyarakat haji untuk mengikuti kegiatan di IPHI terus bertambah. *Kedua*, secara sosial ekonomi anggota IPHI merupakan masyarakat menengah keatas, misalkan di Kabupaten Sragen dari 21 kecamatan sudah ada 17 kecamatan yang mempunyai gedung pertemuan megah (kegunaan: kantor, balai pertemuan dan jasa sewa), dimana 4 kecamatan yang belum mempunyai gedung dilakukan penggalangan dana. Kondisi IPHI Kabupaten Sragen saat ini menyusul kemajuan IPHI Kabupaten Klaten. *Ketiga*, menjadi penyakit ormas biasa kurang tertib dalam mengelola aset. Hambatan yang dihadapi: *pertama*, iuran anggota tidak bisa berjalan dan *kedua*, membuat Kartu Anggota dengan menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Plus Multifungsi.

Pembinaan Pasca Ibadah Haji di Kota Batu, Jawa Timur

Kuota jemaah haji di Kota Batu tidak banyak karena penduduknya juga sedikit. Hingga tahun 2019, Kota Batu masih menjadi tujuan wisata alam terbaik di Jawa Timur. Dengan luas wilayah sekitar 202,30 km², Kota Batu terdiri atas tiga kecamatan yaitu: Batu, Bumiaji, dan Junrejo. Sebagian besar penduduknya adalah petani dan pedagang. Daerah yang berada di sebelah barat laut Kota Malang ini terkenal dengan agrowisata. Penduduknya pun terdampak kemajuan ekonomi yang terus melaju, sehingga calon jemaah hajinya pun terus meningkat.

Keadaan Jemaah Haji Kota Batu, dengan tingkat kemakmuran seperti tersebut di atas, dari sekitar 203.299 penduduk Kota Batu (BPS, 2019), jumlah

pendaftar di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) menunjukkan tren naik atau calon jemaah haji di Kota Batu terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu dan kuota haji selalu terisi penuh sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Menurut Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Batu H. Achmad Faiz, S.Ag, M.H.I, setiap hari sedikitnya ada tiga pendaftar baru atau dalam setahun ada lebih dari 600 pendaftar haji reguler. Dalam wawancara pada tanggal 24 Oktober 2019 di Batu, H. Faiz menjelaskan:

“Dari sisi jumlah jemaah di Kota Baru termasuk besar persentasenya. Setiap hari ada pendaftar baru. Jemaah haji Kota Batu Tahun 2019 sebanyak 201 orang yang secara pendidikan, profesi dan usia, semuanya berada dalam kondisi terbaik. Pendidikan sarjana mendominasi, profesi wiraswasta dan PNS terbanyak, dan mayoritas sedang dalam usia produktif alias prima.”

Keadaan jemaah haji di Kota Batu tersebut merupakan modal besar untuk memaksimalkan peran para haji sepulang dari tanah suci. Bimbingan manasik haji oleh Kantor Kementerian Agama Kota Batu dan KUA Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik. Tingkat serapan materi juga dinilai memenuhi standar minimal yang ditetapkan, yaitu mengetahui manasik ibadah secara komprehensif, memahami hal-hal yang harus dikerjakan dari embarkasi hingga debarkasi, mengetahui lingkungan dua kota suci Makkah dan Madinah, dan dapat mengatasi keadaan darurat jika terjadi sesuatu. Hal ini sukses dilaksanakan karena didukung latar pendidikan calon jemaah yang cukup tinggi, yaitu rerata sarjana srata satu, latar profesi yang tidak asing lagi hal-hal baru dari kalangan PNS dan wiraswasta.

Namun demikian, dalam keadaan baik pun, jemaah sepulang haji masih perlu mendapatkan bimbingan atau pembinaan pasca ibadah haji. Menurut Ketua Majelis Ulama (MUI) Kota Batu K.H. Abdullah Thahir dalam wawancara pada tanggal 24 Oktober 2019, tidak sedikit dijumpai jemaah sepulang ibadah haji tetapi belum sempurna amaliah ibadah sehari-harinya.

“Para haji itu sudah dianggap mampu dalam ilmu agama, padahal mereka sebelum haji memang tidak ahli agama. Namun demikian, karena para haji memang harus menjadi teladan dalam aktivitas keseharian di tengah masyarakat maka mereka dituntut paham ritual agama dan dipahamkan tentang menjaga kemabruran. Hal ini untuk menghindari jemaah sepulang haji dalam waktu beberapa tahun kemudian mengulang kebiasaan kurang baik sebelumnya.”

Untuk menjaga kemabruran haji, IPHI Kota Batu menghimpun para haji dalam banyak kegiatan. Ketua Pengurus Daerah IPHI (PD IPHI) Kota Batu H. Hadi Nur Yatim setiap musim haji secara simbolis ikut melepas dan menerima jemaah haji bersama Walikota Batu dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu untuk memberi isyarat bahwa sepulang haji akan berkhidmat kepada umat di IPHI Kota Batu untuk kemabruran. Dalam wawancara pada tanggal 24 Oktober 2019 di Kota Batu, terkait pembinaan pasca ibadah haji Yatim menjelaskan:

“Kegiatan pembinaan pasca ibadah haji yang dilakukan oleh IPHI Kota Batu antara lain kajian dan pengajian rutin di dua aula milik sendiri dengan kapasitas 500 jemaah dan 700 jemaah. Selain menggunakan sound system juga dilengkapi dengan infocus. Narasumber

pengajian umumnya adalah pengurus para IPHI, MUI, PCNU dan pejabat Kantor Kementerian Agama Kota Batu. Materi-materi pengajian mencakup pada usaha menjaga kemabruran haji. Kegiatan lainnya adalah kegiatan bersama masyarakat berupa bakti sosial pada peringatan hari besar Islam dan pengobatan gratis yang disposori Rumah Sakit IPHI Kota Batu. Meski rumah sakitnya baru di tipe C, tetapi peran keumatannya sudah di level tipe A, rutin membantu masyarakat luas melalui IPHI."

Secara umum peluang pembinaan Jemaah pasca ibadah haji di Kota Batu lebih baik lagi dapat dicapai. Pendukungnya adalah SDM penyandang haji yang baik, organisasi penyelenggara pembinaan pasca ibadah haji yaitu IPHI Kota Batu tergolong mapan dan terkelola dengan baik. Para Pengurus MUI yang terdiri dari para tokoh dari NU dan Muhammadiyah juga mendukung kegiatan yang dilakukan oleh IPHI.

Dengan potensi itu, pembinaan pasca ibadah haji yang langsung dilakukan oleh PD IPHI Kota Batu dapat terlaksana secara maksimal. Hal ini karena sebagian besar jemaah haji dari Kota Batu adalah peserta bimbingan KBIHU Al-Ikhlas yang dikelola PD IPHI Kota Batu. Hal lain yang mendukung adalah PD IPHI Kota Batu memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, antara lain memiliki Aula, juga memiliki aset seperti Rumah Sakit tipe C, memiliki ruko-ruko yang disewakan ke minimarket dan perkantoran. Dengan kekayaan tersebut, PD IPHI Kota Batu dapat membiayai kegiatan pembinaan pasca haji bahkan berkegiatan sosial seperti santunan bersama ratusan yatim dan dhuafa pada setiap peringatan hari besar Islam. PD IPHI Kota Batu memiliki kantor sendiri, bahkan badan otonom di bawahnya seperti Kelompok Pengajian

Muslimah IPHI dan Angkatan Muda Haji (AMHI) juga eksis.

Pembinaan Pasca Ibadah Haji di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

Dengan luas wilayah 1.782 km² Kabupaten Lamongan berpenduduk 1,6 juta jiwa (BPS, 2017). Dibanding Kota Batu, penduduk Kabupaten Lamongan delapan kali lebih banyak, sebanding dengan jumlah jemaah hajinya. Masyarakatnya secara tradisional agamis dan menaruh perhatian kuat pada haji. Jumlah jemaah haji Kabupaten Lamongan termasuk kategori banyak, selama lima tahun terakhir kuotanya antara 1.400 hingga 1.660 jemaah setiap tahun, dengan tambahan kuota umumnya mendekati angka 1.800 jemaah.

Di daerah ini Islam tumbuh kuat sejak zaman Walisongo. Dari pantai utara Lamongan, Tuban, Gresik dan Surabaya, para wali silih berganti berdakwah. Tercatat Maulana Ishaq, Sunan Drajat dan Sunan Sendang dimakamkan di daerah Pantai Utara Paciran Lamongan. Belum termasuk Sunan Bonang dan Maula Makdum Ibrahim Asmorokondi (generasi awal Walisongo dari Samarkan) di Tuban dan Sunan Giri serta Maula Malik Ibrahim (generasi awal Walisongo dari Timur Tengah) yang juga sederet di garis utara Lamongan. Tidak heran kemudian berdiri banyak pesantren, banyak perguruan tinggi Islam dan pada akhirnya jumlah jemaah hajinya pun banyak, bersamaan dengan itu bermunculan KBIHU berbasis pondok pesantren.

Kepala Seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan H. Banjir Mulyo, dalam wawancara pada Senin, 28 Oktober 2019 menjelaskan:

"Masyarakat Lamongan agamis sejak dulu karena dalam pengaruh dekat dakwah para wali. Jemaah haji dan antreannya banyak karena kesadaran religinya tinggi. Latar belakang

jemaah haji Kabupaten Lamongan Tahun 2019 didominasi kelompok berpendidikan dasar dan pekerjaannya sebagai petani. Namun berbeda dengan lima tahun sebelumnya, di Kabupaten Lamongan jemaah yang berangkat ke tanah suci tidak lagi didominasi usia lanjut dan berisiko tinggi, jemaah haji saat ini berusia produktif. Dengan latar pendidikan dan profesi tersebut meski sedang berada di usia produktif, tingkat penyerapan bimbingan dan pembinaan jemaah kurang terserap dengan baik."

Bimbingan manasik haji yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan dan KUA kecamatan, serta KBIHU dengan jumlah jemaah yang demikian banyak dan tersebar di 27 kecamatan, tentu berbeda dengan di Kota Batu yang hanya di tiga kecamatan. Dari sisi jumlah peran serta masyarakat dalam bimbingan manasik haji sebelum keberangkatan yang diwakili oleh KBIHU juga menampakkan ciri dan cara yang berbeda. Kabupaten Lamongan mempunyai 17 KBIHU yang sebagian besar berbasis di pondok pesantren dan masjid, namun ada juga yang dikelola pengurus organisasi keagamaan dan lainnya dikelola para tokoh agama. Ini berbeda dengan di Kota Batu yang hanya ada dua KBIHU.

Dengan semaraknya kegiatan pembinaan manasik sebelum keberangkatan ternyata tidak menjamin pemahaman yang maksimal. Ada banyak faktor penyebab dan dengan keadaan seperti ini maka pembinaan pasca haji lebih dibutuhkan lagi bagi jemaah haji yang kembali ke tanah air. Seperti diurai sebelumnya, hal ini karena sepulang haji tugas ritual dan sosial seorang penyandang haji bertambah. Ada yang menghadapi dengan benar, banyak yang kurang dan ada yang menghindar bahkan ada yang kembali ke kehidupan sebelum berangkat haji. Hal itu karena

tuntutan masyarakat tidak sebanding dengan kemampuan respon jemaah. Oleh karena itu, tidak hanya pembinaan sebelum berangkat haji, pasca ibadah haji juga sangat diperlukan.

Bentuk pembinaan pasca ibadah haji di Kabupaten Lamongan dengan jumlah jemaah haji kurang lebih sebanyak 1.700 jemaah dapat digambarkan bahwa PD IPHI Kabupaten Lamongan kurang berperan dalam bimbingan manasik sebelum keberangkatan haji. Kondisi saat penelitian di Kabupaten Lamongan belum ada pembinaan pasca ibadah haji yang dilakukan secara terprogram. Ketua MUI Kabupaten Lamongan K.H. Aziz Khairi berharap ada pembinaan pasca haji. Dalam wawancara pada tanggal 28 Oktober 2019 ia menjelaskan:

"Kondisi jemaah haji dari kalangan bawah sangat membutuhkan pembinaan pasca haji. Mereka dengan manasik haji saja sudah bingung, ditambah peran sosial sepulang haji akan makin menjadi beban. Oleh karena itu perlu dibuatkan pembinaan pasca ibadah haji yang materinya disesuaikan agar tidak menjadi beban tetapi justru menjadi tantangan yang harus dijalankan. Ada baiknya juga memiliki silabus dan jadwal yang pasti dalam waktu tertentu saja."

Pengurus Daerah IPHI Kabupaten Lamongan sejauh ini tidak mengadakan kegiatan khusus pembinaan pasca haji karena berbagai sebab meski terdapat sarana seperti Gedung Persaudaraan Haji yang representatif. KBIHU juga tidak melakukan pembinaan pasca haji karena langsung disibukkan dengan persiapan bimbingan manasik haji sebelum keberangkatan bagi jemaah tahun berikutnya. Demikian juga pertemuan antar jemaah haji (kloter) hanya temporer, namun terdapat majelis antar jemaah haji dan masyarakat umum yang dikelola tokoh agama/kiai.

Adapun potensi yang dapat dikembangkan dalam pembinaan Jemaah pasca ibadah haji di Kabupaten Lamongan, selain jumlah Jemaah haji yang banyak, juga sebagian besar tingkat pendidikan dasar yang sangat memerlukan pembinaan. PD IPHI Kabupaten Lamongan sudah memiliki gedung pertemuan yang luas, juga mendapat dukungan luas dari para tokoh agama yang bersemangat menyambut adanya program pembinaan pasca ibadah haji. Tidak terselenggaranya pembinaan pasca ibadah haji terhambat karena tidak ada program dan tidak ada anggaran pendukung terutama dari pemerintah setempat.

Berdasarkan keterangan Ketua MUI Kabupaten Lamongan K.H. Aziz Khiri, Ketua Daerah IPHI Kabupaten Lamongan K.H. Abdus Salam, dan Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah KBIHU Pesantren Matholiul Anwar Lamongan, bimbingan dan pembinaan hanya diberikan sebelum keberangkatan ibadah haji. MUI tidak memiliki jenis kegiatan khusus seperti pembinaan jemaah haji, sementara PD IPHI Kabupaten Lamongan dalam beberapa tahun ini dapat dikatakan fakum dari kegiatan pembinaan kecuali secara simbolis eksis dalam pelepasan keberangkatan jemaah haji dan penyambutan kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci.

Sementara itu, Kasi PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan H. Banjir Mulyo menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada kegiatan pembinaan pasca ibadah haji karena memang tidak diprogramkan oleh pemerintah. Organisasi seperti IPHI Kabupaten Lamongan seharusnya mendapat dukungan pemerintah untuk menjalankan program pembinaan pasca ibadah haji. Dalam wawancara pada tanggal 28 Oktober 2019 dia menyatakan:

“Saya berharap pemerintah membuat program pembinaan pasca ibadah

haji karena para haji yang kembali ke masyarakat sangat membutuhkan tambahan pengetahuan aplikatif terkait peran ritual dan sosial para haji yang makin meningkat. Jika ada program maka akan muncul anggarannya, dan akan diperlukan silabusnya, akan jelas durasi pelaksanaannya dan pelaksanaannya. Hasilnya, diharapkan dengan pembinaan yang terprogram, kesempurnaan ritual dan sosial para haji terwujud sebagai manifestasi mabrur sepanjang hayat.”

Baik di Kota Batu maupun Kabupaten Lamongan, masyarakat haji mengharapkan program pembinaan pasca ibadah haji dapat dilaksanakan. Untuk pelaksanaannya dibutuhkan anggaran, pelaksana, dan kurikulum atau kisi-kisi silabus materi dakwah atau kajian yang komprehensif dan diberikan dalam tempo yang ditentukan secara terukur. Keberadaan IPHI dalam menjalankan program kegiatan pembinaan pasca ibadah haji di masing-masing daerah berbeda, ada yang aktif dan ada yang kurang aktif.

SIMPULAN

Berdasarkan paparan dan pembahasan di atas dapat disebutkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk mencapai haji mabrur jemaah haji sebelum keberangkat dan pada waktu penyelenggaraan ibadah haji mendapatkan pembinaan bimbingan manasik haji dan saat kembali ke masyarakat untuk memelihara haji mabrur sepanjang hayat membutuhkan pembinaan pasca ibadah haji yang terprogram.
2. Pembinaan untuk memelihara haji mabrur terhadap para *hujaj* di Indonesia yang jumlahnya sangat besar yang selama ini aktif melakukan pembinaan pasca ibadah haji hanya

IPHI. Pembinaan pasca ibadah haji yang dilakukan IPHI untuk memelihara dan mengupayakan pelestarian haji mabrur yang diridhai Allah SWT, dalam hal ini IPHI memerlukan dukungan dari berbagai unsur baik dari pemerintah (Kementerian Agama), pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan peran aktif masyarakat haji.

3. Kementerian Agama perlu meninjau kembali kebijakan dan program pembinaan pasca ibadah haji kepada para *hujaj*, demikian juga perlu meninjau kembali hubungannya dengan IPHI sebagai organisasi masyarakat yang aktif melakukan pembinaan pasca ibadah haji yang kelahirannya 'difasilitasi' oleh Kementerian/Departemen Agama.
4. PPIPHI sebagai organisasi keagamaan Islam yang berbasis masyarakat haji harus menyiapkan diri menuju organisasi yang sehat dan mandiri, dan perlu mengupayakan PW IPHI dan PD IPHI yang fakum tidak mempunyai program kegiatan untuk menjalankan visi dan misinya dalam berkhidmat mewujudkan haji mabrur sepanjang hayat.

REKOMENDASI

Penelitian ini sudah berupaya menjawab penelitian, bahwa untuk meningkatkan peran masalah para haji di tengah masyarakat diperlukan pembinaan pasca ibadah haji. Rekomendasi dari penelitian ini adalah:

IPHI sebagai organisasi masyarakat haji yang secara khusus berkhidmat dalam menjaga kemabruran haji, dapat berinisiatif untuk mendapat dukungan dan bersinergi dengan semua pihak meliputi: pemerintah, Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, PIHK, Ormas

keagamaan Islam lain, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dukungan untuk IPHI dimaksud mencakup di antaranya: akses sumber-sumber (data, anggaran dan SDM Pembina), sarana dan prasarana. Hal ini merupakan tantangan bagi kepengurusan IPHI yang sudah ada di 34 Provinsi, 497 dari 539 Kabupaten/Kota dan lebih dari 5.000 kecamatan. IPHI menjadi rumah bersama semua golongan masyarakat haji sehingga tepat untuk mewujudkan kemabruran sepanjang hayat bagi para haji.

Hasil penelitian ini secara umum dapat di gunakan sebagai bahan untuk evaluasi dan mereformulasi kebijakan oleh Direktorat Jenderal Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, R.I, untuk melakukan atau tidak dalam pembinaan pasca ibadah haji kepada jumlah penyandang haji yang jumlahnya cukup besar.

IPHI sebagai organisasi masyarakat yang independen perlu menyusun rencana program dan kegiatan strategis, mencakup 3 (tiga) skala prioritas, yaitu: menyusun kisi-kisi silabus materi dakwah yang disesuaikan dengan kebutuhan para haji, kompetensi pelaksana dan narasumber; mendorong setiap Pengurus Wilayah IPHI Provinsi dan PD IPHI Kabupaten/Kota, sampai kecamatan mempunyai fasilitas kesehatan; dan dalam pemberdayaan ekonomi umat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Di akhir tulisan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian tentang isu yang angkat dalam penelitian ini. Ucapan terimakasih kepada beberapa informan yang terlibat dalam pengumpulan data dan informasi, khususnya para Pengurus

Pusat IPHI dan Pengurus Daerah IPHI Kabupaten Lamongan dan Kota Batu. Penulis juga memberi ucapan terimakasih di tujukan kepada Mitra Bestari dan Pengelola Jurnal Harmoni yang telah memberikan saran dan catatan perbaikan tulisan ini, hingga bisa di terbitkan pada

Jurnal Harmoni edisi kali ini. Tidak lupa, terimakasih juga kepada Keluarga Almarhum Mahrus Ali (bersama penulis dalam pengumpulan data dan penulisan artikel ini, meninggal dunia di Lamongan, pada 27 Juni 2020).

DAFTAR ACUAN

- Abdurrahman, Moeslim. (2009). *Bersujud Di Baitullah, Ibadah Haji Mencari Kesalehan Hidup*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Aldyan, Rizal Akbar. (2017). *Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Surakarta Tahun 1992-2014*, Skripsi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Danarto. (1984). *Orang Jawa Naik Haji*, Jakarta: Graffiti.
- Darmadi, Dadi (Ed.). (2018). *Tradisi Haji Dalam Masyarakat Beberapa Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Puslitbang Bimas Agama dan layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama R.I, Ed. 1, Cet. 1.
- Dien Majid, M. (2008). *Berhaji di Masa Kolonial*. Jakarta: Penerbit CV. Sejahtera ISBN 9798799589248
- Endraswara, Suwardi. (2006). *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Idiologi, Epsitemologi, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Imam Syaukani (Ed.). (2009). *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Kementerian Agama R.I. (2015), *Fiqih Haji Komprehensif*, Jakarta, Penerbit Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- Koeswinarno. (2014). *Efektivitas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, Dalam Memberikan Pelayanan dan dan Bimbingan Terhadap Jemaah Haji*. Jakarta: Penerbit Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama, R.I., Cetakan pertama.
- KPHI, (2019). *Laporan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2018*, Tidak diterbitkan.
- Loir, Hendri Chambert. (2013). *Naik Haji di Masa Silam Kisah-Kisah Orang Indonesia Naik Haji 1482-1964*. Jakarta: Penerbit KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Cetakan pertama.
- _____. (2016). *Fiqih Haji Komprehensif*. Jakarta: Penerbit Kementerian Agama R.I, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, R.I. Cetakan II.
- Muhadjir, Noeng. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulyana, Deddy. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Rosdakarya. Cetakan ke-9
- Munawir, Ahmad Warsun. (1984). *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif
- Naniek, Kasniah. (2012). *Tahapan Menentukan Informan dalam Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Putuhena, Shaleh. (2007). *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta: LkiS.
- Rokhmad, Ali. (2016). *Manajemen Haji, Membangun Tata Kelola Haji Indonesia*. Jakarta Pusat: Penerbit Media Dakwah, Cetakan I.
- Sobari, Mohamad. (1996). *Tamu Allah*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Sumitro, Seno Hadi, (2017). *Konsepsi Haji Mabruur Perspektif Al Qur'an*, Tesis, Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Jurnal dan Website:

Yayan Suryana, *Tradisi Pamitan Haji pada Masyarakat Muslim Purwomartani Kalasan Yogyakarta: Kontestasi Agama dan Budaya*, Sosiologi Reflektif, Volume 8, No. 1, Oktober 2013

<https://batukota.bps.go.id/statictable.html>.

<https://lamongankab.go.id/>